



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan...

33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan...

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.387.292.007.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 62.231.683.311,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.449.523.691.021,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp. 1.372.147.540.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
 - b. bertambah Rp. 55.731.247.467,38 (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Jumlah..

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.427.878.788.177,38 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah).

2. Belanja Daerah

- a. semula Rp. 1.384.792.007.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
- b. bertambah Rp. 62.731.683.311,00 (Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.1.447.523.691.021,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) semula Rp. 15.144.467.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 2) bertambah Rp. 6.500.435.843,62 (Enam Miliar Lima Ratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.21.644.902.843,62 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- 2) berkurang (Rp.500.000.000,00) (Lima Ratus Juta Rupiah)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.19.644.902.843,62 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0 (Nol Rupiah)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.Lampiran...

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Perubahan Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Perubahan Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
10. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana; dan
11. Lampiran XI : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Mengganggu Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa

Produk..

Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.541.566.710	83.855.896.449	2.314.329.739
4.1.01	Pajak Daerah	23.236.100.500	23.470.100.500	234.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	26.000.000	0,00	(26.000.000)
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	26.000.000	0,00	(26.000.000)
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	26.000.000	0,00	(26.000.000)
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.262.000.000	0,00	(2.262.000.000)
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.262.000.000	0,00	(2.262.000.000)
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.262.000.000	0,00	(2.262.000.000)
4.1.01.09	Pajak Reklame	275.000.000	208.000.000	(67.000.000)
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000	208.000.000	(67.000.000)
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000	208.000.000	(67.000.000)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000	0,00	(10.000.000.000)
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000.000	0,00	(10.000.000.000)
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000.000	0,00	(10.000.000.000)
4.1.01.11	Pajak Parkir	128.000.000	0,00	(128.000.000)
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	128.000.000	0,00	(128.000.000)
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	128.000.000	0,00	(128.000.000)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	840.000.000	740.000.000	(100.000.000)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	840.000.000	740.000.000	(100.000.000)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	840.000.000	740.000.000	(100.000.000)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	570.000.000	580.000.000	10.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	570.000.000	580.000.000	10.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	570.000.000	580.000.000	10.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.935.100.500	8.385.100.500	450.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	7.935.100.500	8.385.100.500	450.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.935.100.500	8.385.100.500	450.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000	750.000.000	(450.000.000)
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000	750.000.000	(450.000.000)
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000	750.000.000	(450.000.000)
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	12.807.000.000	12.807.000.000
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	2.162.000.000	2.162.000.000
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	2.162.000.000	2.162.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0,00	10.500.000.000	10.500.000.000
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	10.500.000.000	10.500.000.000
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	24.000.000	24.000.000
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	24.000.000	24.000.000
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	121.000.000	121.000.000
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	121.000.000	121.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.226.549.100	51.286.709.143	49.060.160.043
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	429.646.400	49.024.806.443	48.595.160.043
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	48.595.160.043	48.595.160.043
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	27.595.160.043	27.595.160.043
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	21.000.000.000	21.000.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	209.646.400	209.646.400	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	209.646.400	209.646.400	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	220.000.000	220.000.000	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	220.000.000	220.000.000	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	921.902.700	861.902.700	(60.000.000)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.010.000	0,00	(490.010.000)
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	240.000.000	0,00	(240.000.000)
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000	0,00	(10.000.000)
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	240.010.000	0,00	(240.010.000)
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	262.892.700	0,00	(262.892.700)
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	262.892.700	0,00	(262.892.700)
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000	0,00	(75.000.000)
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	75.000.000	0,00	(75.000.000)
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000	0,00	(7.000.000)
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000	0,00	(7.000.000)
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.000.000	0,00	(87.000.000)
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000	0,00	(20.000.000)
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	67.000.000	0,00	(67.000.000)
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	262.892.700	262.892.700
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	262.892.700	262.892.700
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	75.000.000	75.000.000
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	75.000.000	75.000.000
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	7.000.000	7.000.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	7.000.000	7.000.000
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	75.000.000	75.000.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	75.000.000	75.000.000
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	442.010.000	442.010.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	442.010.000	442.010.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	875.000.000	1.400.000.000	525.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	865.000.000	1.400.000.000	535.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	865.000.000	1.400.000.000	535.000.000
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000	0,00	(10.000.000)
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000	0,00	(10.000.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000	5.782.791.230	1.182.791.230
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.600.000.000	0,00	(4.600.000.000)
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.600.000.000	0,00	(4.600.000.000)
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.600.000.000	0,00	(4.600.000.000)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	5.782.791.230	5.782.791.230
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	5.782.791.230	5.782.791.230
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	5.782.791.230	5.782.791.230
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.478.917.110	3.316.295.576	(48.162.621.534)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000	290.493.000	90.493.000
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	200.000.000	290.493.000	90.493.000

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	200.000.000	290.493.000	90.493.000
4.1.04.05	Jasa Giro	0,00	1.124.803.918	1.124.803.918
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	1.109.356.165	1.109.356.165
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	1.109.356.165	1.109.356.165
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	15.447.753	15.447.753
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	15.447.753	15.447.753
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	57.951.073	57.951.073
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	57.951.073	57.951.073
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	57.951.073	57.951.073
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	16.369.079	16.369.079
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	16.369.079	16.369.079
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	16.369.079	16.369.079
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.800.000.000	1.826.678.506	(3.973.321.494)
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000	814.951.771	(185.048.229)
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000	814.951.771	(185.048.229)
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000	310.574.463	110.574.463
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000.000	310.574.463	110.574.463
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	4.600.000.000	391.302.272	(4.208.697.728)
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.600.000.000	286.302.272	(2.313.697.728)
4.1.04.15.15.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	2.000.000.000	105.000.000	(1.895.000.000)
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	9.850.000	9.850.000
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.850.000	9.850.000
4.1.04.15.41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	300.000.000	300.000.000
4.1.04.15.41.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan	0,00	300.000.000	300.000.000
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	45.478.917.110	0,00	(45.478.917.110)
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	45.478.917.110	0,00	(45.478.917.110)
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	45.478.917.110	0,00	(45.478.917.110)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.290.605.974.000	1.344.022.891.728	53.416.917.728
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.212.877.974.000	1.230.700.954.000	17.822.980.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.018.716.554.000	1.023.771.476.000	5.054.922.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.838.444.000	30.893.366.000	5.054.922.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.216.079.000	9.023.961.000	1.807.882.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.675.612.000	6.595.468.000	919.856.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	0,00	149.642.000	149.642.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	176.442.000	145.741.000	(30.701.000)
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.966.254.000	3.978.327.000	1.012.073.000

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	472.321.000	1.641.766.000	1.169.445.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent	75.647.000	102.372.000	26.725.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.135.591.000	8.135.591.000	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000	1.120.498.000	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	685.119.372.000	685.119.372.000	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	527.667.882.000	527.667.882.000	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000	1.200.000.000	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.249.900.000	3.249.900.000	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	82.911.380.000	82.911.380.000	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.792.993.000	34.792.993.000	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	35.297.217.000	35.297.217.000	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.546.149.000	98.546.149.000	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	932.013.000	932.013.000	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.280.852.000	5.280.852.000	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.622.054.000	11.622.054.000	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Dacrah	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.884.634.000	6.884.634.000	0,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.171.715.000	2.171.715.000	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	71.654.881.000	71.654.881.000	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	209.212.589.000	209.212.589.000	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	66.164.500.000	66.164.500.000	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.485.000.000	2.485.000.000	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	89.684.805.000	89.684.805.000	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.322.747.000	2.322.747.000	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.463.697.000	2.463.697.000	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.491.600.000	7.491.600.000	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.911.700.000	1.911.700.000	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.171.067.000	29.171.067.000	0,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	375.444.000	375.444.000	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.957.000	391.957.000	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.344.072.000	6.344.072.000	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000	406.000.000	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	194.161.420.000	200.664.640.000	6.503.220.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	194.161.420.000	200.664.640.000	6.503.220.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	194.161.420.000	200.664.640.000	6.503.220.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	6.264.838.000	6.264.838.000
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	6.264.838.000	6.264.838.000
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	6.264.838.000	6.264.838.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.728.000.000	113.321.937.728	35.593.937.728
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.728.000.000	109.321.937.728	31.593.937.728
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77.728.000.000	109.321.937.728	31.593.937.728

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000.000	22.769.368.510	4.769.368.510
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.600.000.000	14.805.147.820	3.205.147.820
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.000.000.000	46.084.495.014	14.084.495.014
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	128.000.000	161.722.968	33.722.968
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.000.000.000	25.501.203.416	9.501.203.416
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	4.000.000.000	4.000.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.372.147.540.710	1.427.878.788.177	55.731.247.467
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	957.767.906.788	1.008.032.829.548	50.264.922.760
5.1.01	Belanja Pegawai	556.356.928.696	586.427.303.192	30.070.374.496
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	370.425.830.264	395.335.947.943	24.910.117.679
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	274.777.515.059	297.112.783.727	22.335.268.668
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	239.823.440.179	262.107.288.526	22.283.848.347
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.954.074.880	35.005.495.201	51.420.321
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.727.941.800	27.975.544.120	(2.752.397.680)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.310.538.000	24.465.821.184	(1.844.716.816)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.417.403.800	3.509.722.936	(907.680.864)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.621.610.500	6.541.454.207	(80.156.293)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.621.610.500	6.541.454.207	(80.156.293)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.631.034.900	23.272.151.298	(358.883.602)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.311.943.700	19.975.921.476	(336.022.224)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.319.091.200	3.296.229.822	(22.861.378)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.981.946.700	2.312.938.871	(669.007.829)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.913.107.700	1.954.989.172	(958.118.528)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	68.839.000	357.949.699	289.110.699
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.259.694.900	15.648.087.111	(1.611.607.789)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.171.095.500	13.298.030.514	(873.064.986)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.088.599.400	2.350.056.597	(738.542.803)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	398.268.700	523.144.145	124.875.445
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	398.268.700	523.144.145	124.875.445
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.450.500	6.711.983	(2.738.517)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.584.600	6.027.478	(2.557.122)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	865.900	684.505	(181.395)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.889.282.605	19.648.156.005	7.758.873.400
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.915.064.765	18.448.156.005	7.533.091.240
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	974.217.840	1.200.000.000	225.782.160
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	532.194.200	532.194.200	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	532.194.200	532.194.200	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.596.890.400	1.762.782.276	165.891.876
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.596.890.400	1.762.782.276	165.891.876
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.900.000.000	58.239.130.000	3.339.130.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.691.696.000	33.575.764.559	1.884.068.559
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.691.696.000	33.575.764.559	1.884.068.559
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.354.344.000	3.471.332.308	116.988.308
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.354.344.000	3.471.332.308	116.988.308
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	19.853.960.000	21.192.033.133	1.338.073.133
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.853.960.000	21.192.033.133	1.338.073.133

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.615.322.032	98.177.869.012	562.546.980
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	269.405.220	309.202.005	39.796.785
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	300.000	0,00	(300.000)
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.100.000	0,00	(13.100.000)
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.000.000	3.120.000	120.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Pencerangan Jalan	100.000.000	0,00	(100.000.000)
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.400.000	0,00	(1.400.000)
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.000.000	11.100.000	(900.000)
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.500.000	5.800.000	(2.700.000)
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	111.105.220	83.851.005	(27.254.215)
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.000.000	7.500.000	(12.500.000)
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	197.831.000	197.831.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	99.027.260	114.577.455	15.550.195
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000	10.482.320	6.482.320
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	9.500.000	11.000.000	1.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	25.898.400	0,00	(25.898.400)
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	13.144.935	0,00	(13.144.935)
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	3.750.000	0,00	(3.750.000)
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000	0,00	(350.000)
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.133.925	0,00	(4.133.925)
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung	38.250.000	50.000.000	11.750.000
5.1.01.03.02.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	13.144.635	13.144.635
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	3.750.000	3.750.000
5.1.01.03.02.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	350.000	350.000
5.1.01.03.02.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	4.350.000	4.350.000
5.1.01.03.02.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	21.500.500	21.500.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	89.684.805.000	89.684.805.000	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	89.684.805.000	89.684.805.000	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.463.697.000	2.463.697.000	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.463.697.000	2.463.697.000	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.322.747.000	2.322.747.000	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.322.747.000	2.322.747.000	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.775.640.552	3.282.840.552	507.200.000

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.466.000.552	1.597.590.552	131.590.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.309.640.000	1.685.250.000	375.610.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.750.089.000	19.357.047.000	606.958.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100	105.989.100	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100	105.989.100	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.727.200	115.727.200	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.727.200	115.727.200	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000	76.482.000	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000	76.482.000	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000	111.447.000	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000	111.447.000	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000	30.000.000	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000	30.000.000	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000	3.024.000.000	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000	3.024.000.000	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000	504.000.000	(252.000.000)
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000	504.000.000	(252.000.000)
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.400	270.400	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.400	270.400	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000	500.000	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000	500.000	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.354.062.800	6.213.020.800	858.958.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	108.524.700	108.524.700	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.658.200	2.658.200	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.181.900	7.181.900	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.235.698.000	6.094.656.000	858.958.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000	6.589.500.000	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000	6.589.500.000	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	400.000.000	400.000.000	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	400.000.000	400.000.000	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.014.028.400	1.042.586.437	28.558.037
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000	55.490.760	66.760
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000	55.490.760	66.760
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600	7.768.706	(35.894)
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600	7.768.706	(35.894)
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900	99.883.368	(460.532)
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900	99.883.368	(460.532)
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400	8.243.365	(38.035)
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400	8.243.365	(38.035)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200	381.818	(226.382)
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200	381.818	(226.382)
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000	51.100	(50.900)
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000	51.100	(50.900)
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000	6.000.000	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000	6.000.000	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100	116.100	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100	116.100	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200	348.200	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200	348.200	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	835.000.000	864.303.020	29.303.020
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.000.000	0,00	(1.000.000)
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000.000	0,00	(100.000.000)
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.000.000	7.280.000	(2.720.000)
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	400.000.000	0,00	(400.000.000)
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.000.000	0,00	(5.000.000)
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	30.000.000	25.900.000	(4.100.000)
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000	23.200.000	3.200.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	229.000.000	335.404.020	106.404.020
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	442.519.000	442.519.000
5.1.01.06	Belanja Pencrimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	515.896.200	515.896.200	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	115.896.200	115.896.200	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	115.896.200	115.896.200	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	12.710.362.800	13.254.926.600	544.563.800
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	12.710.362.800	13.254.926.600	544.563.800
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	12.710.362.800	13.254.926.600	544.563.800
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	425.400.000	503.900.000	78.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	425.400.000	503.900.000	78.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	425.400.000	503.900.000	78.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.205.488.324	362.746.501.869	18.541.013.545
5.1.02.01	Belanja Barang	54.450.725.215	56.954.990.196	2.504.264.981
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.838.504.215	55.735.935.917	1.897.431.702
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	226.983.450	643.228.520	416.245.070
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	33.020.000	35.712.000	2.692.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	420.800.000	420.600.000	(200.000)
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.170.626.730	1.247.235.730	76.609.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	218.000.400	212.807.400	(5.193.000)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.060.000	20.005.000	7.945.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	202.285.000	174.865.000	(27.420.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.549.958.500	2.508.487.500	(41.471.000)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	76.701.000	76.701.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	509.142.350	208.987.350	(300.155.000)
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	5.200.000	5.200.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	14.000.000	14.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	179.790.000	191.391.000	11.601.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.937.902.180	6.351.042.051	413.139.871
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.491.125	4.434.244	(35.056.881)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.881.109.800	8.865.250.150	984.140.350

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	144.820.000	132.130.000	(12.690.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	489.223.600	459.440.800	(29.782.800)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	475.567.700	632.562.800	156.995.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	357.045.880	449.535.380	92.489.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	143.265.000	124.535.000	(18.730.000)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	289.028.000	435.191.000	146.163.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera Mata	465.350.000	470.000.000	4.650.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	277.360.000	243.319.000	(34.041.000)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.671.341.500	3.672.141.500	800.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	75.938.000	73.853.000	(2.085.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.291.772.500	8.794.009.242	(497.763.258)
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	163.000.000	151.000.000	(12.000.000)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	108.142.500	81.231.250	(26.911.250)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.111.750.000	8.863.510.000	(248.240.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.052.330.000	5.165.030.000	1.112.700.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.000.000	8.000.000	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	24.500.000	4.900.000	(19.600.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.052.900.000	3.594.650.000	(458.250.000)
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDII dan WKDII	105.000.000	105.000.000	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000	700.000.000	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.000.000	21.000.000	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.000.000	20.000.000	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.000.000	4.550.000	(8.450.000)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	63.000.000	69.000.000	6.000.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.000.000	10.000.000	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	90.000.000	90.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	149.100.000	154.000.000	4.900.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	32.550.000	85.050.000	52.500.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	142.350.000	142.350.000	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	37.365.000	51.476.560	14.111.560
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	37.365.000	51.476.560	14.111.560
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	574.856.000	1.167.577.719	592.721.719
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.220.000	5.420.000	(1.800.000)
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.500.000	14.550.000	1.050.000
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	7.766.000	2.386.000	(5.380.000)
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	150.000.000	150.000.000
5.1.02.01.04.0126	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	15.120.000	22.680.000	7.560.000
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	39.060.000	27.000.000	(12.060.000)
5.1.02.01.04.0128	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	24.130.000	0,00	(24.130.000)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.900.000	8.900.000	0,00
5.1.02.01.04.0134	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	36.000.000	36.000.000	0,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	64.000.000	97.000.000	33.000.000
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	284.160.000	664.160.000	380.000.000
5.1.02.01.04.0519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	4.481.719	4.481.719
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	75.000.000	135.000.000	60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	123.020.975.824	131.771.787.333	8.750.811.509
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.532.041.045	62.793.654.259	(738.386.786)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.545.925.000	3.180.925.000	(365.000.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.160.230.000	954.890.000	(205.340.000)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	45.000.000	89.200.000	44.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.333.200.000	932.200.000	(401.000.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.550.000	5.850.000	300.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	106.000.000	129.000.000	23.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	338.400.000	338.400.000	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.044.950.000	2.057.850.000	12.900.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.728.372.000	9.679.372.000	(49.000.000)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	334.850.000	339.450.000	4.600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	85.372.816	103.872.830	18.500.014
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kctenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	805.200.000	921.600.000	116.400.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.065.000.000	3.969.250.000	(95.750.000)
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	465.000.000	465.000.000	0,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	252.000.000	204.000.000	(48.000.000)
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	156.000.000	156.000.000	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	366.000.000	205.200.000	(160.800.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.041.522.000	891.672.000	(149.850.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.156.000.000	1.531.000.000	(625.000.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	780.000.000	1.299.200.000	519.200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.817.366.600	3.513.921.500	(303.445.100)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.077.560.000	5.390.960.000	313.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.069.880.000	2.161.380.000	91.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.192.000.000	1.319.000.000	127.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	135.000.000	216.000.000	81.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	50.000.000	50.000.000	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	45.900.000	42.300.000	(3.600.000)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	12.400.000	12.400.000	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.244.346.844	3.857.046.844	(387.300.000)
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	27.500.000	27.500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	48.000.000	48.000.000	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	286.500.000	286.500.000	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	141.100.000	123.700.000	(17.400.000)
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000	40.000.000	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	61.572.000	53.172.000	(8.400.000)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	557.200.000	584.200.000	27.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	237.400.000	329.360.000	91.960.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0,00	1.200.000	1.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.348.353.781	3.265.652.081	(82.701.700)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.025.620.000	5.598.220.000	572.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.821.350.004	1.928.890.004	107.540.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	58.870.000	43.270.000	(15.600.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	154.550.000	154.550.000	0,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.300.000.000	5.300.000.000	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	612.500.000	612.500.000	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	380.000.000	380.000.000	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.134.120.429	11.333.579.869	199.459.440
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	20.000.000	0,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.546.980.429	10.546.980.429	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	270.000.000	270.000.000	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	45.840.000	38.888.640	(6.951.360)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	57.300.000	48.610.800	(8.689.200)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	194.000.000	409.100.000	215.100.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	37.500.000	37.500.000	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.000.000	30.000.000	0,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.500.000	7.500.000	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.480.233.350	11.845.762.205	(634.471.145)
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	15.000.000	15.000.000	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.446.824.400	9.425.091.200	(21.733.200)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.386.500.000	903.300.000	(483.200.000)
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	29.000.000	72.500.000	43.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.568.408.950	1.344.371.005	(224.037.945)
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	4.500.000	6.000.000	1.500.000
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	30.000.000	79.500.000	49.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	203.230.000	169.360.000	(33.870.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	71.280.000	47.410.000	(23.870.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.400.000	20.400.000	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	81.550.000	81.550.000	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	629.400.000	370.400.000	(259.000.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	629.400.000	370.400.000	(259.000.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	21.893.728.000	31.837.458.000	9.943.730.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000	1.900.000.000	1.650.000.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	8.100.000.000	13.241.730.000	5.141.730.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.230.000.000	2.830.000.000	600.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	1.462.000.000	1.462.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	90.000.000	90.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	3.100.000.000	3.100.000.000	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Perencanaan Wilayah	2.025.000.000	2.950.000.000	925.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	250.000.000	250.000.000	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.203.780.000	5.203.780.000	0,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	734.948.000	734.948.000	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	75.000.000	75.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.924.500.000	4.761.000.000	(163.500.000)
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	14.500.000	8.000.000	(6.500.000)
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	4.650.000.000	4.570.000.000	(80.000.000)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	260.000.000	183.000.000	(77.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.186.223.000	8.623.073.000	436.850.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.455.043.000	4.784.093.000	329.050.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.569.150.000	1.888.950.000	319.800.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.118.400.000	1.906.400.000	(212.000.000)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	43.630.000	43.630.000	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.363.338.103	28.686.742.556	(1.676.595.547)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.617.574.500	2.099.774.500	482.200.000
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	85.000.000	613.900.000	528.900.000
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.532.574.500	1.485.874.500	(46.700.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.324.150.000	3.293.350.000	(30.800.000)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	56.000.000	56.000.000	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.550.550.000	2.445.550.000	(105.000.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	223.200.000	240.300.000	17.100.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	101.500.000	104.500.000	3.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	154.700.000	182.000.000	27.300.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.000.000	19.000.000	0,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	40.600.000	40.600.000	0,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.500.000	2.500.000	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	16.100.000	16.800.000	700.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	60.900.000	70.000.000	9.100.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	56.000.000	56.000.000	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	33.100.000	38.100.000	5.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.000.000	22.000.000	12.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.391.613.603	17.613.618.056	(1.777.995.547)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.564.995.820	5.316.075.820	751.080.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	36.000.000	36.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.760.617.783	12.195.542.236	(2.565.075.547)
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	66.000.000	66.000.000	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.030.000.000	5.680.000.000	(350.000.000)
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.500.000.000	3.500.000.000	0,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.475.000.000	1.125.000.000	(350.000.000)
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	55.000.000	55.000.000	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.150.001.000	45.424.646.000	2.274.645.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.150.001.000	45.424.646.000	2.274.645.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.042.880.000	20.113.410.000	1.070.530.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.857.461.000	21.389.201.000	531.740.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.442.340.000	3.135.115.000	692.775.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	807.320.000	786.920.000	(20.400.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.756.688.000	8.499.458.000	(257.230.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.400.500.000	1.323.120.000	(77.380.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	322.600.000	362.720.000	40.120.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	59.500.000	44.500.000	(15.000.000)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.002.500.000	900.000.000	(102.500.000)
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15.900.000	15.900.000	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.356.188.000	7.176.338.000	(179.850.000)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.690.188.000	3.399.688.000	(290.500.000)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.666.000.000	3.776.650.000	110.650.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.823.125.122	42.418.623.269	595.498.147
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.823.125.122	42.418.623.269	595.498.147
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.823.125.122	42.418.623.269	595.498.147
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.640.635.060	48.990.254.515	6.349.619.455
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.640.635.060	48.990.254.515	6.349.619.455
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.640.635.060	48.990.254.515	6.349.619.455
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000	5.500.000.000	4.000.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.500.000.000	5.500.000.000	4.000.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.500.000.000	5.500.000.000	4.000.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.500.000.000	5.500.000.000	4.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	55.705.489.768	53.359.024.487	(2.346.465.281)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.021.337.200	28.021.337.200	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.021.337.200	28.021.337.200	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.021.337.200	28.021.337.200	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.694.737.900	24.402.761.647	(2.291.976.253)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.703.437.900	21.472.161.647	768.723.747
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.848.822.900	19.576.080.000	1.727.257.100
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.854.615.000	1.896.081.647	(958.533.353)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.412.100.000	1.437.100.000	25.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.412.100.000	1.437.100.000	25.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan	4.479.200.000	1.318.500.000	(3.160.700.000)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan	4.459.200.000	1.240.000.000	(3.219.200.000)
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan	20.000.000	78.500.000	58.500.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	175.000.000	75.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	175.000.000	75.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668	934.925.640	(54.489.028)
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668	934.925.640	(54.489.028)
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668	934.925.640	(54.489.028)
5.2	BELANJA MODAL	145.391.480.922	146.593.994.833	1.202.513.911
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.305.037.500	28.120.559.374	1.815.521.874
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	95.688.600	95.688.600	0,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	45.688.600	45.688.600	0,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	45.688.600	45.688.600	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.000.000	50.000.000	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	50.000.000	50.000.000	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.656.340.000	2.656.340.000	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.656.340.000	2.656.340.000	0,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.656.340.000	2.656.340.000	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	0,00	(1.000.000)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.000.000	0,00	(1.000.000)
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.000.000	0,00	(1.000.000)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.000.000	7.000.000	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.000.000	7.000.000	0,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.000.000	7.000.000	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.946.913.572	10.702.968.372	4.756.054.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	147.302.500	513.481.300	366.178.800
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	147.302.500	513.481.300	366.178.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.599.996.072	9.908.877.072	4.308.881.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.464.000.000	9.227.000.000	4.763.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	116.776.000	183.475.000	66.699.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	3.100.000	3.100.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.019.220.072	490.793.072	(528.427.000)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	4.509.000	4.509.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	199.615.000	280.610.000	80.995.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	63.500.000	63.500.000	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	49.352.000	63.267.000	13.915.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.000.000	20.340.000	7.340.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	73.763.000	127.423.000	53.660.000

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0,00	6.080.000	6.080.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.127.000	21.787.000	9.660.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.127.000	21.787.000	9.660.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	9.660.000	9.660.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.127.000	12.127.000	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.536.245.000	2.536.245.000	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.448.478.300	2.448.478.300	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.083.948.299	2.083.948.299	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	167.148.001	167.148.001	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	197.382.000	197.382.000	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	87.766.700	87.766.700	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	87.766.700	87.766.700	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.757.285.150	1.345.000.000	(412.285.150)
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.757.285.150	1.345.000.000	(412.285.150)
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.757.285.150	1.345.000.000	(412.285.150)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.237.290.000	3.121.783.000	884.493.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	725.730.000	1.537.273.000	811.543.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	725.730.000	1.537.273.000	811.543.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.511.560.000	1.584.510.000	72.950.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.511.560.000	1.584.510.000	72.950.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.366.024.000	1.366.024.000	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.366.024.000	1.366.024.000	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.366.024.000	1.366.024.000	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	134.195.000	134.195.000	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	134.195.000	134.195.000	0,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	134.195.000	134.195.000	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	135.440.000	47.060.000	(88.380.000)
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	135.440.000	47.060.000	(88.380.000)
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	135.440.000	47.060.000	(88.380.000)
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.419.489.178	6.086.468.402	(3.333.020.776)
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.419.489.178	6.086.468.402	(3.333.020.776)
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.419.489.178	6.086.468.402	(3.333.020.776)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.353.965.912	14.509.908.549	(844.057.363)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.353.965.912	14.509.908.549	(844.057.363)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.353.965.912	14.509.908.549	(844.057.363)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.497.740.000	2.681.982.888	184.242.888
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.856.225.912	11.827.925.661	(1.028.300.251)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.319.595.460	102.139.595.460	820.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	98.744.595.460	99.214.595.460	470.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	75.784.669.739	76.254.669.739	470.000.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	75.784.669.739	76.254.669.739	470.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	22.959.925.721	22.959.925.721	0,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	22.959.925.721	22.959.925.721	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.575.000.000	2.925.000.000	350.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.500.000.000	1.675.000.000	175.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.500.000.000	1.675.000.000	175.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.075.000.000	1.250.000.000	175.000.000
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.075.000.000	1.250.000.000	175.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.310.000	141.440.000	5.130.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	136.310.000	141.440.000	5.130.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	136.310.000	141.440.000	5.130.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	136.310.000	141.440.000	5.130.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.276.572.050	1.682.491.450	(594.080.600)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	100.000.000	100.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	100.000.000	100.000.000
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Kajian	0,00	100.000.000	100.000.000

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.276.572.050	1.582.491.450	(694.080.600)
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.276.572.050	1.582.491.450	(694.080.600)
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.276.572.050	1.582.491.450	(694.080.600)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.200.000.000	2.450.000.000	(750.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000	2.450.000.000	(750.000.000)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000	2.450.000.000	(750.000.000)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000	2.450.000.000	(750.000.000)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000	2.450.000.000	(750.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	278.432.620.000	290.446.866.640	12.014.246.640
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.650.000.000	2.650.000.000	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Dacrah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.400.000.000	2.400.000.000	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.400.000.000	2.400.000.000	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Dacrah Kepada Pemerintahan Desa	2.400.000.000	2.400.000.000	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000	250.000.000	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000	250.000.000	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000	250.000.000	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.782.620.000	287.796.866.640	12.014.246.640
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	780.000.000	780.000.000	0,00
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	780.000.000	780.000.000	0,00
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	780.000.000	780.000.000	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000	287.016.866.640	12.014.246.640
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000	287.016.866.640	12.014.246.640
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000	287.016.866.640	12.014.246.640
	Jumlah Belanja	1.384.792.007.710	1.447.523.691.021	62.731.683.311
	Total Surplus/(Defisit)	(12.644.467.000)	(19.644.902.844)	(7.000.435.844)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.144.467.000	21.644.902.844	6.500.435.844
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.144.467.000	21.644.902.844	6.500.435.844
6.1.01.05	Penghematan Belanja	15.144.467.000	21.644.902.844	6.500.435.844
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	15.144.467.000	21.644.902.844	6.500.435.844
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	15.144.467.000	21.644.902.844	6.500.435.844
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.144.467.000	21.644.902.844	6.500.435.844
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
	Pembiayaan Netto	12.644.467.000	19.644.902.844	7.000.435.844
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012